



LKIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayahNya, sehingga Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 telah dapat di selesaikan. Penyusunan LKIP dimaksud merupakan salah satu upaya menuju Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang lebih baik. LKIP Tahun 2025 ini merupakan bentuk pelaporan kinerja di tahun terakhir pada BPBD Tahun 2025.

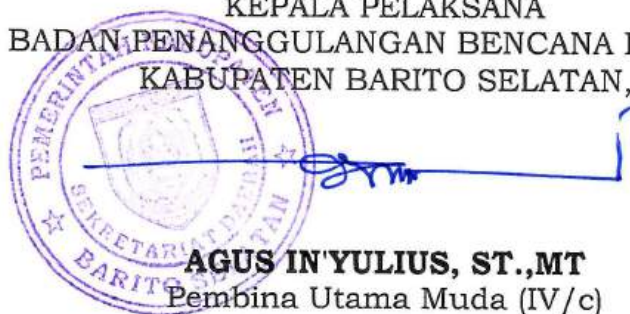
Di sadari bahwa LKIP ini masih jauh dari sempurna, namun kami terus berupaya untuk meningkatkannya, baik dalam penyajian data maupun dalam penulisan, kami perlu juga masukan dan saran untuk evaluasi kinerja maupun perbaikan di masa akan datang.

Di samping pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan LKIP tahun 2025 ini merupakan satu kebutuhan sebagai bahan evaluasi kinerja yang dilaksanakan guna penyempurnaan kinerja selanjutnya. Dan tentunya merupakan suatu pemenuhan kewajiban, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKIP BPBD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 dapat terlaksana berkat dukungan dan kerjasama pimpinan beserta staf BPBD Kabupaten Barito Selatan.

Selanjutnya kami berharap semoga LKIP BPBD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025, bermanfaat khususnya bagi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dalam upaya untuk melakukan peningkatan Kinerja.

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,



AGUS IN'YULIUS, ST.,MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690806 200312 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR DATA DAN GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja	1
1.4. Gambaran Umum BPBD Kabupaten Barito Selatan	2
1.4.1. Struktur Organisasi	2
1.4.2. Kedudukan dan Susunan Organisasi	3
1.5. Tugas dan Fungsi	4
1.6. Isu-isu Strategis	6
1.7. Keadaan Pegawai	9
1.8. Keadaan Sarana dan Prasarana	10
1.9. Keuangan	12
1.10. Sistematika Penulisan LKIP	12
BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	14
2.1. Perencanaan Strategis	14
2.2. Visi dan Misi Kepala Daerah	14
2.3. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	16
2.4. Strategi, Program dan Kegiatan	16
2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	17
2.6. Rencana Anggaran Tahun 2025	18
2.6.1. Target Belanja	18
2.6.2. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2025	20
3.2. Kelompok Sasaran Layanan	20
3.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	21

3.4.	Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	23
1.	Sasaran Strategis	23
2.	Target dan Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2025	24
3.	Capaian Indikator Sasaran BPBD Tahun 2024-2025	24
3.4.1.	Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya	25
1.	Standar Pelayanan Minimal (SPM)	25
2.	SPIP MATURITAS	27
3.5.	Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan	28
A.	Faktor Pendorong	28
B.	Faktor Penghambat	29
3.6.	Realisasi Anggaran	30
BAB IV.	PENUTUP	37
4.1.	Kesimpulan	37
4.2.	Saran	37

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Tugas dan Fungsi	4
Tabel 1.2. Teknik Menyimpulkan Isu Strategis	9
Tabel 1.3. ASN BPBD Berdasarkan Jabatan dan Golongan	9
Tabel 1.4. Rekapitulasi Pemenuhan Anjab Tahun 2025	10
Tabel 1.5. Kelengkapan Sarana dan Prasarana BPBD	11
Tabel 2.1. Arah Kebijakan	16
Tabel 2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis BPBD Tahun 2025-2030	16
Tabel 2.3. Strategi, Program dan Kegiatan	17
Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	17
Tabel 2.5. Sasaran Program Perjanjian Kinerja 2025	18
Tabel 2.6. Target Belanja BPBD APBD Perubahan Tahun 2025	18
Tabel 2.7. Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis	19
Tabel 3.1. Capaian Kinerja Tahun 2025 (Sasaran Strategis dan Program)	20
Tabel 3.2. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	24
Tabel 3.3. Capaian Indikator Sasaran BPBD Tahun 2024-2025	24
Tabel 3.4. Persentase Realisasi Capaian SPM Tahun 2025	25
Tabel 3.5. Capaian Standar Pelayanan Minimal/Indikator Kinerja Kunci Outcome Sub Urusan Bencana Tahun 2025	26
Tabel 3.6. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2025	30
Tabel 3.7. Tabel serapan anggaran	32
Tabel 3.8. Perhitungan Efektivitas Realisasi Anggaran Belanja	33
Tabel 3.9. Perhitungan Efisiensi Anggaran Belanja pada BPBD Kabupaten Barito Selatan	34

DAFTAR DATA DAN GAMBAR

Gambar 1.1.	Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Barito Selatan	3
Gambar 3.1.	Realisasi Indikator Sasaran	24
Gambar 3.2.	Grafik Indeks Risiko Bencana	34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menggantikan peraturan sebelumnya yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan kinerja pemerintah yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab. Guna mewujudkan Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, BPBD Kabupaten Barito Selatan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi BPBD Kabupaten Barito Selatan.

Oleh karena itu, BPBD Kabupaten Barito Selatan dalam mewujudkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab tersebut akan menuangkan hasil pelaksanaan kebijakan dan program Tahun Anggaran 2025 dalam Laporan Kinerja yang mencerminkan tugas pokok dan fungsinya.

1.2. Landasan Hukum

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3);
3. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja BPBD Kabupaten Barito Selatan.

1.3. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

Laporan Kinerja ini merupakan pertanggungjawaban BPBD Kabupaten Barito Selatan untuk menilai keberhasilan program dalam

pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam Laporan Kinerja ini diuraikan hasil evaluasi berupa analisis akuntabilitas kinerja sasaran dalam rangka mewujudkan Tujuan, Visi, dan Misi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Pelaporan Kinerja bertujuan untuk memberikan :

1. Peningkatan akuntabilitas BPBD Kabupaten Barito Selatan;
2. Memberikan umpan balik bagi peningkatan kinerja BPBD Kabupaten Barito Selatan;
3. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kekurangan dalam melaksanakan tugas sebagai rekomendasi tindak lanjut tahun berikutnya, dan;
4. Sebagai salah satu rujukan dalam pengambilan keputusan Pimpinan.

1.4. Gambaran Umum BPBD Kabupaten Barito Selatan.

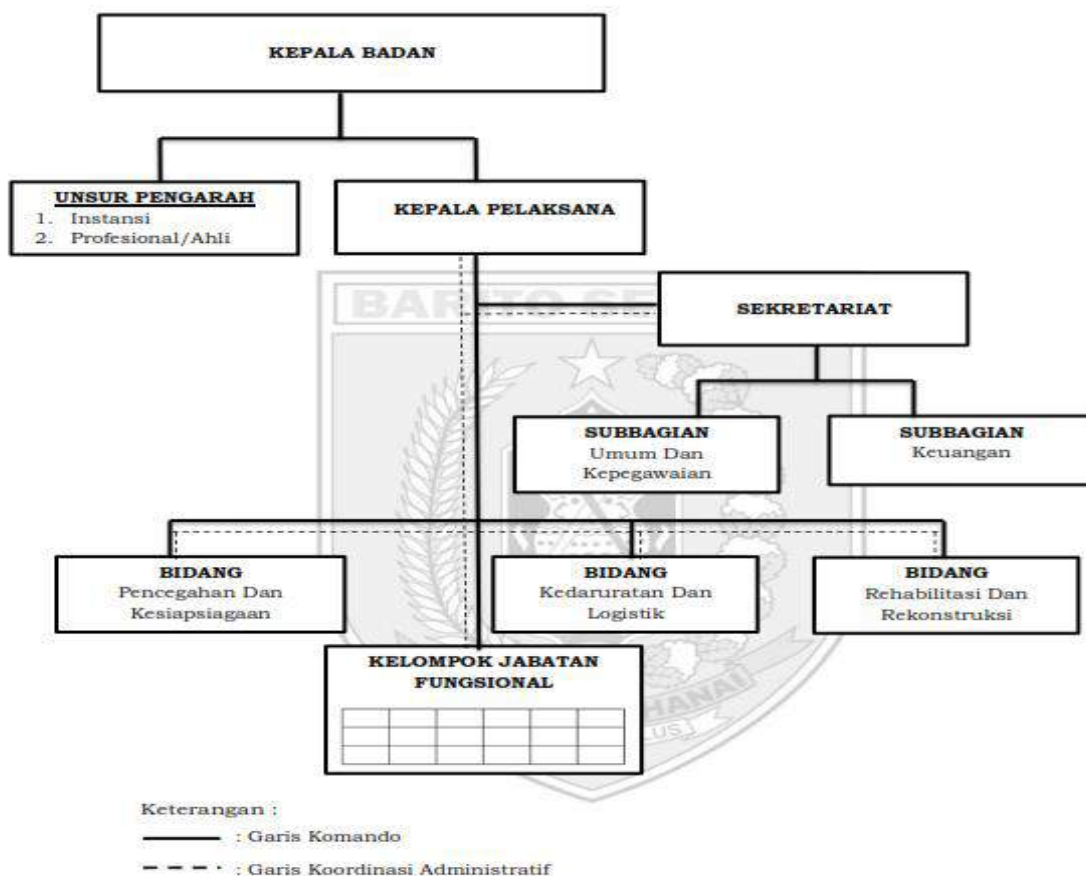
Sebagai perangkat daerah yang di bentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi dibidang Penanggulangan Bencana yang berperan dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan, Urusan Penanggulangan Kebencanaan sebagai implementasi tentang organisasi dan Tata Kerja BPBD Kabupaten Barito Selatan.

1.4.1. Struktur Organisasi

BPBD Kabupaten Barito Selatan di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Satuan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan dan Peraturan Bupati Barito Selatan No. 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja BPBD Kabupaten Barito Selatan, maka dapat dilihat bagan struktur organisasi BPBD Kabupaten Barito Selatan seperti gambar di bawah ini:

STRUKTUR ORGANISASI BPBD KABUPATEN BARITO SELATAN **(Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024)**

Gambar 1.1. Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Barito Selatan



1.4.2. KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

BPBD Kabupaten Barito Selatan sebagai salah satu Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan memiliki Susunan Organisasi yang terdiri dari:

1. Kepala Badan;
2. Kepala Pelaksana;
3. Sekretariat, membawahkan;
4. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
5. Subbagian Perencanaan dan Keuangan
6. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
7. Seksi Kedaruratan dan Logistik;
8. Seksi Rehabilitasi dan Rekontruksi;
9. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (3) Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian yang melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

1.5. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja BPBD Kabupaten Barito Selatan, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan pengkoordinasian urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada sub urusan bencana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BPBD mempunyai uraian Tugas dan Fungsi :

Tabel 1.1. Tugas dan Fungsi

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS & FUNGSI
1	Kepala Badan	Membantu Bupati dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kebijakan BPBD.
2	Unsur Pengarah (Instansi – Profesional/Ahli)	Mempunyai tugas memberikan masukan dan saran Kepala Badan dalam penanggulangan bencana, serta mempunyai fungsi yaitu : - Menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah; - Memantau dan mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

3	Unsur Pelaksana	Melaksanakan penanggulangan bencana daerah secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Dalam melaksanakan tugasnya, unsur pelaksana mempunyai fungsi : • Pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana; • Pengkomandoan penyelenggaraan penanggulangan bencana; • Pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
4	Kepala Pelaksana	Membantu Kepala Badan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana Badan sehari-hari. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Pelaksana dibantu oleh : • Sekretaris; • Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan; • Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik; • Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
5	Sekretaris	Membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana dalam melaksanakan pengelolaan ketatausahaan Badan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi : • Pengkoordinasian penyusunan program dan pelaporan Badan; • Pengumpulan, pengolahan dan analisis data Badan; • Pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Badan; • Pengelolaan administrasi keuangan Badan; • Pengelolaan situs web; • Monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kinerja Badan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris dibantu oleh : • Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

		• Kepala Sub Bagian Keuangan.
7	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Badan dan mempunyai fungsi : • Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan dan perjalanan dinas; • Pengadaan, pemeliharaan, dan inventarisasi perlengkapan; • Pengelolaan administrasi kepegawaian Badan.
8	Kepala Sub Bagian Keuangan	Membantu Sekretaris melaksanakan penyusunan dan pengelolaan administrasi keuangan Badan dan mempunyai fungsi : • Pengelolaan administrasi keuangan Badan; • Pengelolaan administrasi penyusunan anggaran Badan; • Pengelolaan pengendalian dan pertanggungjawaban administrasi keuangan Badan.
9	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Membantu Kepala Pelaksana dalam melaksanakan pengelolaan penyelenggaraan pencegahan bencana. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi : • Pengumpulan dan pengolahan serta analisis data sumber bahaya atau ancaman bencana dan data kesiapsiagaan bencana; • Penyusunan petunjuk teknis mitigasi bencana dan kesiapsiagaan bencana; • Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan risiko bencana dan Pelaksanaan pelatihan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.
10	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	Membantu Kepala Pelaksana dalam melaksanakan pengelolaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat. Untuk menyelenggarakan tugas

		tersebut, Kepala Bidang Kedaruratan mempunyai fungsi : • Pengumpulan dan pengolahan serta analisis data tanggap darurat bencana dan logistik bencana; • Penyusunan petunjuk teknis tanggap darurat bencana dan petunjuk teknis pengelolaan logistik bencana; • Pelaksanaan penanganan korban bencana dan pengelolaan bantuan sosial korban bencana; • Pelaksanaan penanganan pengungsi.
11	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Membantu Kepala Pelaksana dalam melaksanakan pengelolaan rehabilitasi pasca bencana. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kepala Bidang Rehabilitasi mempunyai fungsi : • Pengumpulan dan pengolahan serta analisis data rehabilitasi dan Rekontruksi pasca bencana; • Penyusunan petunjuk teknis rehabilitasi dan Rekontruksi pasca bencana; • Pengkoordinasian dan pelaksanaan rehabilitasi lingkungan dan pembangunan kembali sarana dan prasarana umum yang terkena bencana; • Pengkoordinasian dan pelaksanaan perbaikan dan pembangunan rumah masyarakat yang terkena bencana; • Pengkoordinasian dan pelaksanaan pemulihan kondisi sosial, budaya, ekonomi, keamanan dan ketertiban serta pemulihan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik.
12	Kelompok Jabatan Fungsional	Membantu tugas dan fungsi sesuai dengan penempatannya.

1.6. Isu-isu Strategis

Merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan dan memiliki dampak dalam jangka waktu tertentu bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun isu strategis tersebut adalah :

1. Kerentanan Wilayah terhadap Bencana
 - Kabupaten Barito Selatan rawan banjir, kebakaran hutan/lahan, dan angin puting beliung.
 - Tingginya intensitas hujan dan kondisi geografis menambah risiko bencana.
2. Keterbatasan Sumber Daya
 - Jumlah personel dan peralatan penanggulangan bencana masih terbatas.
 - Belum semua kecamatan memiliki pos siaga atau sarana pendukung yang memadai.
3. Koordinasi Antar Lembaga
 - Perlu peningkatan sinergi antara BPBD, instansi terkait, TNI/Polri, relawan, serta masyarakat.
 - Mekanisme komunikasi darurat masih perlu diperkuat.
4. Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat
 - Tingkat kesadaran masyarakat dalam mitigasi bencana masih rendah
 - Kesiapsiagaan berbasis komunitas belum berjalan optimal.
5. Pendanaan dan Dukungan Anggaran
 - Anggaran penanggulangan bencana masih terbatas.
 - Ketergantungan pada anggaran darurat menimbulkan keterlambatan dalam respon cepat.
6. Pemanfaatan Teknologi dan Informasi
 - Sistem peringatan dini (early warning system) masih belum optimal.
 - Pemanfaatan teknologi informasi untuk pemantauan dan penyebaran informasi perlu ditingkatkan.

Penguatan kemampuan mitigasi dan adaptasi daerah terhadap bencana perlu dilakukan mengingat potensi bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Kerentanan wilayah terhadap bencana seperti banjir, kebakaran hutan dan lahan, serta genangan air akibat curah hujan tinggi menjadi tantangan nyata yang harus diantisipasi. Peningkatan sistem deteksi dini bencana menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ini, dimana sistem peringatan yang handal mampu memberikan informasi lebih awal memprediksi dan mengantisipasi bencana yang datang memungkinkan evakuasi tepat waktu, meminimalkan korban dan kerugian, serta mendorong mitigasi melalui infrastruktur tahan bencana, penataan ruang, dan kesiapsiagaan Masyarakat.

Tabel 1.2. Teknik Menyimpulkan Isu Strategis

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Kebijakan Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
	Risiko gangguan bencana terhadap ketahanan wilayah	Banjir dan genangan	Global Warming	Terbatasnya Kapasitas sumber daya di bidang penanggulangan bencana Meningkatnya potensi dampak dan risiko bencana geologi		Penguatan kemampuan mitigasi dan adaptasi terhadap bencana

1.7. Keadaan Pegawai

Jumlah personil yang ada per Desember 2025 sebanyak 57 (lima puluh tujuh) orang yang terdiri dari 48 orang ASN dan 9 orang Tenaga Kontrak. Untuk rincian personil ASN dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.3. ASN BPBD Berdasarkan Jabatan dan Golongan

No	Golongan	Jenis Kelamin		Pendidikan						
		L	P	S3	S2	S1	D-IV	D-III	SMA	SMP
1.	IV/c	1			1					
2.	IV/b									
3.	IV/a	1					1			
4.	III/d	3	1		1	3				
5.	III/c									
6.	III/b	2	1			1		2		
7.	III/a	9	4			11			2	
8.	II/d	2							2	
9.	II/c									
10.	II/b	2								2
11.	II/a									
12.	PPPK - IX	1	1			2				
13.	PPPK - VII	1						1		
14.	PPPK - V	14	5						19	
Jumlah		36	12		2	17	1	3	23	2

Tabel 1.4.. Rekapitulasi Pemenuhan Anjab Tahun 2025

No	Unit kerja	ASN	Honorrer	Jumlah
1.	Kepala Pelaksana	1	-	1
2.	Sekretariat	13	5	18
3.	Bidang Kedaruratan dan Logistik	9	1	10
4.	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	8	1	9
5.	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	19	1	20
JUMLAH		48	8	56

Melihat tupoksi BPBD yang begitu banyak tidak berbanding dengan kualitas dan kuantitas SDM yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Barito Selatan, sehingga dikarenakan kekurangan SDM yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Barito Selatan, maka BPBD Kabupaten Barito Selatan belum mampu mengerjakan seluruh tupoksi dengan maksimal. Kredibilitas pegawai merupakan penunjang terbesar dalam keberhasilan melakukan pelayanan kepada masyarakat dan faktor penunjang terlaksananya program kegiatan dengan maksimal. Maka dibutuhkan penambahan pegawai BPBD Kabupaten Barito Selatan yang mempunyai kredibilitas dalam management penanggulangan bencana, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

1.8. Sarana dan Prasarana

Dukungan sarana prasarana di BPBD Kabupaten Barito Selatan dapat menunjang dalam upaya memaksimalkan kinerja didalam melakukan upaya penanggulangan bencana baik kinerja pegawai maupun kinerja organisasi, dimana dapat dilihat pada kondisi sarana prasarana yang dimiliki BPBD Kabupaten Barito Selatan hingga saat ini, dimana perlu dilakukan pengembangan kebutuhan demi memaksimalkan serta mengefisiensi kinerja BPBD Kabupaten Barito Selatan. Kondisi sarana prasarana yang dimiliki BPBD Kabupaten Barito Selatan dapat dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini:

Tabel 1.5.. Kelengkapan Sarana dan Prasarana BPBD

NO	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG	KONDISI (B/BR/RB)
1	Mesin pompa	5	BAIK
2	Sepeda Motor	14	BAIK
3	Genset	1	BAIK
4	Mesin TIK	1	BAIK
5	Absensi	2	BAIK
6	Lemari Kaca	5	BAIK
7	Filing Kabinet	4	BAIK
8	Brangkas	1	BAIK
9	lemari arsip	1	BAIK
10	kursi kerja	38	BAIK
11	kursi panjang kayu	2	BAIK
12	tenda	4	BAIK
13	velbet	26	BAIK
14	kursi sofa	1	BAIK
15	meja	12	BAIK
16	mesin pemotong rumput	1	BAIK
17	kulkas	1	BAIK
18	ac	8	BAIK
19	hand lamp	15	BAIK
20	drone	1	BAIK
21	kipas angin dinding	4	BAIK
22	magic com	1	BAIK
23	TV	2	BAIK
24	speaker aktif	2	BAIK
25	wireless	1	BAIK
26	Kamera	3	BAIK
27	handy cam	11	BAIK
28	gps	1	BAIK
29	selang	33	BAIK
30	nozzle	1	BAIK
31	Y connect	2	BAIK
32	Jet Shooter	43	BAIK
33	PC	6	BAIK
34	laptop	7	BAIK
35	Hardisk	1	BAIK
36	Printer	7	BAIK
37	Proyektor	1	BAIK
38	HT	14	BAIK
39	Perahu	2	BAIK
40	Mobil	8	BAIK

1.9. Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi BPBD pada Tahun 2025 berasal dari APBD Kabupaten Barito Selatan. Pada tahun anggaran 2025 BPBD mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.367.584.765,- dengan rincian belanja pegawai sebesar Rp 3.764.654.957,- belanja barang dan jasa sebesar Rp 3.747.939.589,- Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 70.000.000 serta Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 784.990.219,-

1.10. Sistematika Penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan LKIP BPBD Kabupaten Barito Selatan tahun 2025 adalah sebagai berikut: Ringkasan Eksekutif memuat:

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala- kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;
2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKIP/manfaat LKIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi BPBD, Potensi yang menjadi ruang lingkup BPBD dan Sistematika penulisan LKIP.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepada Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

Disajikan pula Inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat daerah. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada maupun yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Memasuki Tahun 2025, BPBD menyusun Rencana Strategis (Renstra) BPBD Tahun 2025-2029. Renstra BPBD merupakan manifestasi komitmen BPBD dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan yang tertuang dalam RPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra BPBD Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten (RPJMD) adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah periode tahun 2025-2029. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di BPBD yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

2.2. Visi dan Misi Kepala Daerah

Sejak di tetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka telah terjadi perubahan penyebutan terhadap organisasi perangkat daerah, yang dulunya disebut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), tetapi sekarang penyebutan tersebut berubah menjadi Perangkat Daerah (PD). Setiap perangkat daerah tidak perlu lagi untuk merumuskan visi dan misi masing – masing perangkat daerah, visi dan misi daerah hanya satu yaitu visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih atau visi dan misi Kabupaten.

Kabupaten Barito Selatan untuk tahun 2025-2029 pembuatan visi dan misi Kabupaten Barito Selatan berdasarkan Rancangan Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Selatan 2025–2029, dimana RPD ini juga memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, pembangunan lintas daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu tahun 2025-2029 yang disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Barito Selatan tahun 2025-2029, RPJMN Tahun 2025-2029, dan RPJMD Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029.

Visi Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 adalah: ***“Terwujudnya Barito Selatan yang Sejahtera, Berdaya Saing, serta Menjadi Penyangga Pangan dan Energi Ibu Kota Nusantara”*** Untuk mencapai visi tersebut maka Pemerintah Kabupaten Barito Selatan telah menetapkan 5 (lima) misi.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Terdapat 5 (lima) misi yang akan diupayakan untuk mewujudkan visi Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025- 2029 yaitu:

1. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang agamis, sehat, cerdas dan terampil.
2. Mengembangkan daya saing ekonomi daerah yang berbasis sumber daya lokal, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
3. Mengembangkan infrastruktur wilayah yang mendukung percepatan pengembangan ekonomi dan sosial budaya.
4. Memantapkan kondisi sosial budaya daerah berbasiskan kearifan lokal.
5. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik, serta
6. Mewujudkan ketahanan pangan daerah yang berkelanjutan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, BPBD mendukung pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah untuk **“Upaya Ketahanan Bencana”**. Hal ini dilatar belakangi dengan kondisi penanggulangan bencana di Kabupaten Barito Selatan dimana belum tersedia sebuah sistem yang terintegrasi dan terpadu antara pemerintah, masyarakat, swasta, akademisi dan praktisi serta media, baik dalam penyediaan sarana dan prasarana, manajemen, maupun kegiatan operasional dalam penanganan kebencanaan secara umum serta partisipasi serta penyebaran informasi terkait penanggulangan bencana, sehingga perancangan sistem terpadu antara pemerintah, masyarakat, swasta, akademisi dan praktisi serta media dalam kerangka pentaheliks dan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana untuk meminimalisir risiko bencana sangat diperlukan.

Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan konsep terintegrasi yaitu mengurangi risiko bencana – menanggulangi bencana secara cepat – membangun kembali masyarakat dan lingkungan yang terdampak bencana. Untuk itu, RPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 menyebutkan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan yang terkait dengan penanggulangan bencana adalah:

Tabel 2.1. Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan pemanfaatan energi untuk mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan	Upaya Ketahanan Bencana	Peningkatan Kapasitas Mitigasi dan Sistem Peringatan Dini Bencana	➤ Penguatan Upaya Kapasitas Mitigasi Kebencanaan ➤ Penguatan Sistem Deteksi Dini Bencana Berbasis Teknologi dan Data
		Pengendalian Melalui Solusi Berbasis Alam Sebagai Ketahanan Bencana	➤ Pengembangan Solusi Bebas Alam Untuk Pengendalian Risiko Bencana Alam, Khususnya Banjir dan Kebakaran Hutan

2.3. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Dalam RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 disebutkan Tujuan dan sasaran strategis BPBD Kabupaten Barito Selatan yang akan dicapai dalam beberapa tahun anggaran, yaitu:

Tabel 2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis BPBD Tahun 2025-2030

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan pemanfaatan energi untuk mendorong Pembangunan daerah yang berkelanjutan	Upaya Ketahanan Bencana	Indeks Risiko Bencana	Nilai	115.54	108.86	106.19	103.51	100.83	98,15

2.4. Strategi, Program dan Kegiatan

Tujuan dan sasaran Strategis BPBD Kabupaten Barito Selatan tersebut, kemudian dijabarkan dalam strategi dan program kegiatan yang digunakan, sebagaimana termuat dalam table berikut ini:

Tabel 2.3. Strategi, Program dan Kegiatan

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4
1	Upaya Ketahanan Bencana	Program Penanggulangan Bencana	1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota 2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
2.		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pencegahan. Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kab/Kota

2.5. Perjanjian Kinerja 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN
1	2	3	4	5
1	Upaya Ketahanan Bencana	Indeks Risiko Bencana	Nilai	111,54

Selain memuat Perjanjian Kinerja Sasaran Strategis, Perjanjian Kinerja BPBD Tahun 2025 juga memuat Perjanjian Kinerja Sasaran Program, sebagai berikut:

Tabel 2.5. Sasaran Program Perjanjian Kinerja 2025

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN
1	2	3	4	5
1	Peningkatan ketangguhan daerah dalam menghadapi risiko bencana	➤ Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana ➤ Penanganan Tanggap Darurat Bencana ➤ Penanganan Pasca Bencana	Persen Persen Persen	98 100 100

2.6. Rencana Anggaran Tahun 2025

Pada Tahun Anggaran 2025 BPBD melaksanakan kegiatan dengan Anggaran Murni dan Perubahan sebesar Rp. 8.367.584.765,- dengan rincian Belanja Pegawai sebesar Rp. 3.764.654.957,- Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 3.747.939.589,- Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 70.000.000,- serta Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 784.990.219,-.

2.6.1. Target Belanja

Jika dibuat dalam bentuk perbandingan alokasi masing-masing belanja, maka persentase dari masing-masing jenis belanja APBD Perubahan BPBD Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6. Target Belanja BPBD APBD Perubahan Tahun 2025

Uraian	Target	Persentase
Belanja Pegawai	Rp. 3.764.654.957,-	44.99%
Belanja Barang dan Jasa	Rp. 3.747.939.589,-	44.79%
Belanja Bantuan Sosial	Rp. 70.000.000,-	0,84%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 784.990.219,-	9.38%
Jumlah	Rp. 8.367.584.765,-	100%

2.6.2. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2025 BPBD yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7. Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis

No.	Sasaran	Anggaran	Persentase	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Upaya Ketahanan Bencana	Rp. 1.916.106.800,-	100%	Program Penanggulangan Bencana Rp. 1.714.528.100,- 1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Rp. 525.158.000,- 2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Rp. 548.117.300,- 3. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Rp. 460.584.700,- 4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Rp. 180.668.100,- Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran. Rp. 201.578.700,- 1. Pencegahan. Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kab/Kota. Rp. 201.578.700,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2025

Catatan sejarah kejadian bencana Kabupaten Barito Selatan menunjukkan bahwa Kabupaten Barito Selatan merupakan daerah rawan bencana. Dalam tahun 2025, Kabupaten Barito Selatan telah mengalami beberapa kali kejadian bencana, Kejadian bencana tersebut meliputi bencana banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem dan Kebakaran Hutan dan Lahan. Kejadian bencana banjir merupakan kejadian bencana yang paling sering terjadi. Kejadian bencana-bencana yang pernah terjadi menimbulkan dampak negatif, baik itu korban jiwa, harta benda maupun lingkungan/lahan yang rusak serta dampak psikologis bagi masyarakat di Kabupaten Barito Selatan.

Tabel 3.1. Capaian Kinerja Tahun 2025 (Sasaran Strategis dan Program)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Upaya Ketahanan Bencana	Indeks Risiko Bencana	Nilai	120,40	117,50	100% <i>(karena target menurunkan IRB (penilaian BNPB))</i>

Sumber: BPBD Kabupaten Barito Selatan

3.2. Kelompok Sasaran Layanan

Adapun Kelompok sasaran dari kegiatan yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Barito Selatan, terdiri atas:

1. Masyarakat Umum

Masyarakat secara luas merupakan penerima manfaat utama layanan BPBD, baik dalam bentuk informasi kebencanaan, peningkatan kesadaran akan potensi bencana, maupun layanan tanggap darurat dan pemulihan pascabencana. Layanan ditujukan agar masyarakat lebih siap, tangguh, dan mampu berpartisipasi aktif dalam upaya penanggulangan bencana.

2. Pemerintah Daerah dan Instansi Terkait

BPBD Kabupaten Barito Selatan berperan memberikan dukungan koordinasi, informasi, serta pendampingan teknis kepada perangkat daerah, TNI, Polri, dan instansi vertikal lainnya. Tujuannya adalah memastikan keterpaduan dalam perencanaan, pencegahan, kesiapsiagaan, serta penanganan bencana di wilayah Kabupaten Barito Selatan.

3. *Kelompok Rentan*

Layanan BPBD secara khusus menyasar kelompok yang memiliki kerentanan tinggi seperti anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok ekonomi lemah. Pendekatan yang digunakan adalah pelayanan yang inklusif, responsif, dan memastikan kebutuhan dasar mereka terpenuhi baik dalam kondisi darurat maupun pemulihan.

4. *Lembaga Pendidikan*

BPBD Kabupaten Barito Selatan menjadikan sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi sebagai mitra strategis dalam membangun budaya sadar bencana. Layanan berupa edukasi, simulasi, dan integrasi materi kebencanaan ke dalam kurikulum sehingga peserta didik dan tenaga pendidik lebih siap menghadapi risiko bencana.

5. *Dunia Usaha dan Pelaku Ekonomi*

Sektor usaha dan industri dilibatkan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), dukungan logistik, serta peran dalam menjaga kesinambungan ekonomi saat dan setelah bencana. BPBD memberikan layanan berupa fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan agar dunia usaha ikut serta dalam membangun ketangguhan daerah.

6. *Organisasi Kemasyarakatan dan Relawan*

Organisasi sosial, komunitas lokal, dan relawan menjadi mitra penting BPBD dalam memperluas jangkauan layanan hingga ke tingkat masyarakat. Layanan difokuskan pada pelatihan, pendampingan, dan penguatan kapasitas agar relawan siap siaga membantu penanggulangan bencana secara terpadu.

7. *Media Massa*

Media merupakan saluran utama penyebaran informasi kebencanaan kepada publik. BPBD menyediakan layanan berupa akses informasi resmi, rilis berita, dan kerjasama dalam publikasi untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya.

3.3. **Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Kinerja setiap urusan pemerintahan daerah akan mencerminkan keselarasan komitmen dengan program dan kebijakannya dalam mengelola berbagai kewenangan secara bertanggung jawab. Fokus layanan pada urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar diarahkan pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sebagai prioritas utama peningkatan kualitas hidup. Sementara itu, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar difokuskan pada bidang-bidang yang mendukung keberlanjutan pembangunan daerah. Adapun urusan pemerintahan pilihan memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi lokal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Adapun Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Barito Selatan meliputi aspek-aspek berikut :

1. *Pelayanan Tanggap Darurat*

BPBD Kabupaten Barito Selatan cepat merespon laporan bencana seperti banjir, kebakaran, dan tanah longsor. Tim siaga darurat selalu dikerahkan untuk membantu evakuasi warga serta memberikan bantuan awal.

2. *Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan*

BPBD Kabupaten Barito Selatan melaksanakan sosialisasi kebencanaan ke masyarakat, termasuk simulasi evakuasi, pelatihan relawan, dan edukasi tentang cara menghadapi bencana. Hal ini bertujuan agar masyarakat lebih siap dan mengurangi risiko korban.

3. *Pelayanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi*

Setelah bencana terjadi, BPBD Kabupaten Barito Selatan mendampingi pemulihan dengan menyalurkan bantuan, mendata kerugian, serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah maupun instansi lain untuk mempercepat perbaikan fasilitas umum.

4. *Pelayanan Informasi Kebencanaan*

BPBD Kabupaten Barito Selatan menyampaikan informasi cuaca, potensi bencana, dan himbauan resmi melalui media lokal maupun media sosial, sehingga masyarakat dapat lebih waspada dan mengambil langkah antisipasi.

5. *Kerjasama dan Koordinasi*

BPBD Kabupaten Barito Selatan aktif menjalin kerjasama dengan BPBD kabupaten tetangga, instansi pemerintah, TNI/Polri, dan organisasi relawan untuk memperkuat jaringan penanggulangan bencana.

Walaupun begitu BPBD Kabupaten Barito Selatan memiliki tantangan/catatan dan ruang untuk peningkatan seperti :

1. Status Siaga dan Ketepatan Waktu Respons

- Penetapan status siaga kadang masih bergantung pada parameter tertentu (misalnya kenaikan debit air sampai angka tertentu) yang harus dicermati sebaik mungkin agar respons tidak terlambat.
- Meski ada koordinasi, belum ada indikasi apakah semua desa terpencil memiliki akses cepat untuk bantuan atau proses evakuasi. Ini bisa jadi kendala pada akses dan mobilitas.

2. Skala Dampak dan Kapasitas Logistik

- Saat banjir besar, banyak rumah, fasilitas umum dan infrastruktur terdampak. Pemenuhan kebutuhan logistik (pangan, tempat tinggal darurat, fasilitas kesehatan) menjadi penting dan harus cepat.
- Kekuatan personel dan alat juga menjadi faktor yang menentukan. Untuk karhutla, jumlah personel gabungan sudah ada, tapi intensitas dan karakteristik lahan (termasuk lahan gambut) menambah tantangan teknis.

3. Pemulihan Pascabencana dan Status Transisi

- Penetapan status transisi setelah bencana karhutla menunjukkan bahwa pemulihan memang dilakukan, tapi bagaimana prosedur pemulihan (rehabilitasi, restorasi lahan, dukungan masyarakat terdampak) dan seberapa cepat masih perlu dievaluasi.

4. Pemberdayaan Masyarakat dan Peringatan Dini

- Perlu peningkatan sistem peringatan dini agar masyarakat bisa bereaksi lebih awal. Disiplin informasi (alert, prakiraan cuaca, wilayah rawan banjir) harus terus diperkuat.
- Sosialisasi perlu merata ke desa-desa terpencil agar kesiapsiagaan tidak hanya di pusat kecamatan/kabupaten.

5. Monitoring dan Evaluasi Kinerja

- Belum banyak informasi publik yang menyajikan indikator-indikator kuantitatif seperti Indeks Kepuasan Masyarakat, waktu respons, efisiensi penggunaan anggaran, dan outcome pasca-bencana.
- Peran penilaian eksternal (misalnya dari BNPB atau lembaga independen) akan sangat membantu transparansi dan peningkatan kinerja.

Pada tahun 2025, indikator sasaran strategis BPBD dengan target 120,40 point, dan realisasinya adalah 117,50 point, maka capaian nya adalah 100%, karena semakin turun nilai realisasi nya maka nilai capaian nya indeks risiko bencananya dalam kategori Sangat baik.

3.4. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis BPBD yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci untuk setiap indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis: Upaya Ketahanan Bencana

Tolak ukur capaian sasaran Upaya Ketahanan Bencana dalam penanggulangan bencana diukur dengan 1 (satu) indikator, yaitu indikator: indeks risiko bencana (IRB)

Kinerja sasaran Upaya Ketahanan Bencana dalam Penanggulangan Bencana meningkat dengan indikator Indeks Risiko Bencana dalam Penanggulangan Bencana pada tahun 2025 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.2. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

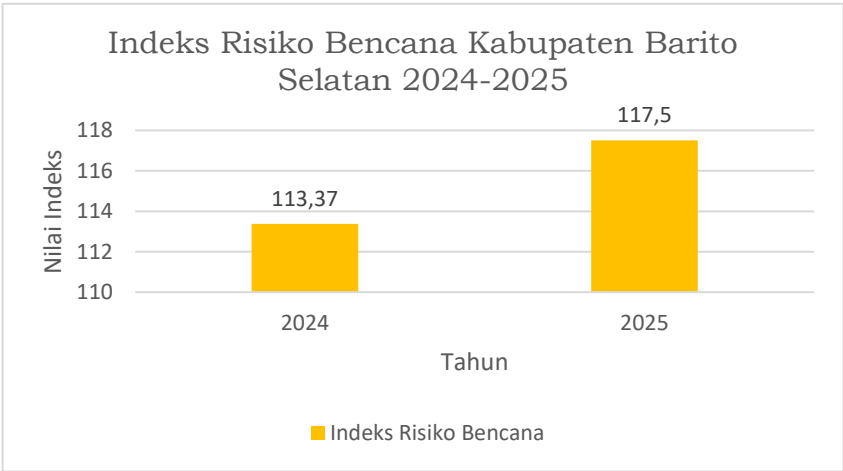
No	Indikator Sasaran	2025			Target Akhir Renstra (2025)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2025 (%)
		Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	4	5	6	7	8
1	Indeks Risiko Bencana	120,40	117,50	100%	111,54	94,93%

Sumber: BPBD Kabupaten Barito Selatan

Pada tahun 2025, capaian target indikator sasaran strategis BPBD telah mencapai 95,97 atau tingkat capaian 100%. Capaian ini digambarkan dalam grafik berikut:

2. Target dan Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2025

Gambar 3.1. Realisasi Indikator Sasaran



3. Capaian Indikator Sasaran BPBD Tahun 2024-2025

Tabel 3.3. Capaian Indikator Sasaran BPBD Tahun 2024-2025

Indikator Sasaran PD	Tahun 2024		Tahun 2025	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Indeks Risiko Bencana dalam Penanggulangan Bencana	120,40	113,37	120,40	117,50

Sumber: BPBD Kabupaten Barito Selatan

3.4.1. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA LAINNYA

1. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan amanat konstitusional yang memastikan setiap warga negara menerima layanan dasar yang layak sebagai bagian dari hak asasi dan keadilan sosial. SPM dimandatkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri yang mengatur urusan SPM terkait. Dalam konteks pembangunan daerah yang berkelanjutan, SPM menjadi instrument krusial untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat, sekaligus menjadi barometer kapasitas pemerintah dalam menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara layanan publik yang efektif dan berkeadilan.

Implementasi SPM tidak hanya mencerminkan akuntabilitas dan kinerja pemerintahan daerah, melainkan juga menjadi sarana untuk mendorong tercapainya tujuan pembangunan nasional yang inklusif, merata, dan berkelanjutan. Penerapan SPM yang konsisten dan progresif berperan penting dalam menurunkan angka kemiskinan, memperkecil kesenjangan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penting dalam perencanaan pembangunan untuk mengintegrasikan secara sistematis SPM ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan perangkat daerah.

Urgensi pelaksanaan SPM menjadi semakin strategis Ketika dihadapkan pada arah pembangunan jangka panjang sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2045, khususnya Tahap I (2025–2029) yang mengusung tema “Transformasi Fondasi Pembangunan”. SPM bukan sekadar instrumen administratif, melainkan elemen strategis yang menjadi titik awal keberhasilan *transformasi pondasi pembangunan*. Pemenuhan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, infrastruktur dasar, perlindungan sosial, dan ketertiban umum menjadi landasan yang tak tergantikan dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan daya saing daerah yang berkelanjutan.

SPM merupakan *entry point* dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pembangunan, agar pondasi transformasi yang dibangun tidak rapuh, melainkan kokoh dan berkelanjutan. Capaian pelaksanaan SPM selama periode 2021–2024 mencerminkan kemajuan yang cukup signifikan sebagai landasan awal menuju transformasi pembangunan. Berikut ini adalah capaian realisasi berdasarkan enam urusan wajib pelayanan dasar:

Tabel 3.4. Persentase Realisasi Capaian SPM Tahun 2025

PERSENTASE (%) REALISASI CAPAIAN SPM		
SPM TRANTIBUMLINMAS BPBD		2025
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	96,00
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	90,11
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100

Capaian Standar Pelayanan Minimal/Indikator Kinerja Kunci Outcome Sub Urusan Bencana Tahun 2025

Tabel 3.5. Capaian Standar Pelayanan Minimal/Indikator Kinerja Kunci Outcome
Sub Urusan Bencana Tahun 2025

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	TAHUN 2025				
		Target Nasional	Realisasi BPBD Kabupaten Barito Selatan			Keterangan
			Jumlah orang yang berhak mendapat layanan	Jumlah orang yang terlayani	Capaian =(5):(4) x 100%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	93.521	93.521	100%	Kegiatan pemberian informasi rawan bencana dapat meliputi: a. Sosialisasi tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana; b. Sosialisasi melalui media sosial dan wahana multimedia; dan c. Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik
Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	93.521	93.521	100%	Data diambil dari Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana adalah jumlah warga yang mendapatkan pelatihan pencegahan dan gladi kesiapan terhadap bencana di kawasan rawan bencana sebagai bentuk layanan langsung yang diterima oleh warga negara sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal sub-urusan bencana daerah kabupaten/kota.

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	TAHUN 2025				
		Target Nasional	Realisasi BPBD Kabupaten Barito Selatan			
			Jumlah orang yang berhak mendapat layanan	Jumlah orang yang terlayani	Capaian =(5):(4) x 100%	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	93.521	93.521	100%	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana adalah jumlah warga negara yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi dari kejadian bencana sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal sub-urusan bencana daerah kabupaten/kota.

Hasil capaian kinerja selama periode 2025 menunjukkan bahwa BPBD Kabupaten Barito Selatan belum sepenuhnya berhasil memenuhi standar pelayanan dasar secara menyeluruh atau mencapai 100 persen. Ini menjadi masalah mendasar yang harus diatasi secara sistemik, konkret, dan berorientasi pada hasil. Melalui komitmen yang kuat dan pendekatan yang sistematis.

2. SPIP MATURITAS

Dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada BPBD Kabupaten Barito Selatan, ada beberapa aspek-aspek yang perlu diperhatikan untuk maturitas (tingkat kematangan) dalam pelaksanaannya seperti:

1. Level Maturitas

Berdasarkan perkembangan penerapan SPIP, BPBD Kabupaten Barito Selatan berada pada **level awal menuju level terdefinisi**. Hal ini ditunjukkan dengan sudah adanya kebijakan, pedoman, dan sebagian prosedur pengendalian intern, meskipun penerapannya belum merata di seluruh unit kerja.

2. Lingkungan Pengendalian

- Struktur organisasi BPBD telah terbentuk sesuai Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- Pimpinan dan jajaran mulai membangun budaya integritas, kedisiplinan, serta kepatuhan terhadap aturan.
- Namun, masih terdapat kelemahan dalam konsistensi penerapan kode etik dan pengawasan melekat di tiap bidang.

3. Penilaian Risiko

- BPBD telah menyusun dokumen rencana penanggulangan bencana, termasuk identifikasi risiko bencana banjir, kebakaran hutan/lahan, dan tanah longsor.
- Namun, analisis risiko internal (misalnya risiko keterlambatan respons, keterbatasan SDM, dan keterbatasan logistik) belum sepenuhnya terdokumentasi dalam sistem SPIP.

4. Kegiatan Pengendalian

- Telah dilakukan langkah pengendalian berupa SOP pada kegiatan tanggap darurat, penyaluran logistik, serta koordinasi lintas instansi.
- Walaupun demikian, SOP belum sepenuhnya terintegrasi dalam proses administrasi rutin, khususnya terkait pengelolaan keuangan, aset, dan pertanggungjawaban program.

5. Informasi dan Komunikasi

- Informasi terkait kebencanaan sudah disampaikan kepada masyarakat melalui media sosial, website pemerintah daerah, dan koordinasi dengan aparat desa.
- Di sisi internal, sistem informasi manajemen belum sepenuhnya terstandar sehingga laporan keuangan, logistik, dan kegiatan terkadang masih lambat atau tidak seragam.

6. Pemantauan Pengendalian Intern

- Telah dilakukan evaluasi kegiatan oleh inspektorat daerah, meskipun pelaksanaannya masih bersifat reaktif (setelah kegiatan berjalan).
- Pemantauan internal oleh pimpinan unit kerja sudah dilakukan, namun belum secara sistematis menggunakan indikator kinerja yang jelas.

3.5. ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN

Dari deskripsi capaian indikator kinerja dan pelaksanaan kegiatan diatas, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan kinerja BPBD Kabupaten Barito Selatan tahun 2025 berpredikat sangat baik dengan capaian indikator kinerja berupa Indeks Risiko Bencana dalam Penanggulangan Bencana 111,54 atau tercapai 100% dari target. Diketahui juga faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

A. Faktor Pendorong

- Capaian indikator kinerja program 100%;

Dari pembahasan diatas, telah diuraikan hubungan antara Penghitungan Indeks Risiko Bencana dalam Penanggulangan Bencana dan capaian indikator kinerja program. Untuk mencapai realisasi target Indeks Risiko Bencana dalam Penanggulangan Bencana 100% maka capaian terget indikator kinerja program juga harus 100%.

- Kegiatan pengendalian, monitoring dan evaluasi berkala;

Pada tahun 2025, kegiatan monitoring dan evaluasi reguler dilaksanakan minimal 1 (satu) bulan sekali, sedangkan untuk pembahasan-pembahasan khusus, rapat koordinasi dan pengendalian dilaksanakan sewaktu-waktu diperlukan. Selain peningkatan pengendalian, monitoring dan evaluasi, perbaikan tatalaksana juga terus dilakukan peningkatan.

- Transparansi data dan informasi;

Pengelolaan data dan informasi BPBD pada tahun 2025 juga mengalami peningkatan, dimana masing-masing bidang telah memiliki sumber data yang terkoneksi melalui website, atau kita bisa mendapatkan data dan informasi dari tim unit data dan informasi penanggulangan bencana.

- Pelibatan lintas sektoral dalam pelaksanaan kegiatan;

Pelibatan lintas sektoral menjadi salah satu perhatian utama pada tahun 2025 dan pengembangan pada tahun-tahun seterusnya. Pada tahun-tahun sebelumnya, kerjasama lintas sektoral yang dilaksanakan oleh BPBD masih bersifat non formal dan belum ada legalitas serta mekanisme yang memadai.

B. Faktor Penghambat

Selain faktor pendorong, beberapa hal dalam pelaksanaan penanggulangan bencana dan pemenuhan indikator kinerja masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan adalah:

1. Jumlah alat pemantau permukaan sungai secara kuantitas masih kurang walaupun sudah tersedia EWS (*early warning system*) pengamatan TMA (tinggi muka air) untuk pemantauan rawan banjir serta EWS pengamatan tinggi muka air tanah untuk pemantauan rawan kebakaran hutan dan lahan;
2. Masih kurangnya sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan tentang penanggulangan bencana;
3. Belum dilakukan kurasi aman bencana bagi bangunan sekolah secara masif;
4. Jumlah pemasangan petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul belum mencakup keseluruhan fasilitas-fasilitas umum dan belum menyebar di beberapa daerah rawan bencana;
5. Dokumen Kajian Risiko Bencana dilaksanakan masih tahap review draf oleh BNPB;

3.6. REALISASI ANGGARAN

Penyerapan anggaran belanja operasional pada tahun 2025 sebesar 99,54% dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 95,89% dan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 96,16%. Sedangkan pencapaian fisik kegiatan adalah 94,93%. Melihat hal ini, dapat disimpulkan bahwa kinerja BPBD Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2025 sudah baik.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2025

Tabel 3.6. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2025

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Sisa Tahun 2025 (Rp)	Penyerapan %
1	2	3	4	5	6
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
1.1.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 206.089.550,-	Rp. 205.518.951,-	Rp. 570.599,-	99,72%
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
2.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 3.755.654.957,-	Rp. 2.078.701.663,-	Rp. 1.676.953.294,-	55,35%
2.2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Rp. 60.995.000,-	Rp. 59.255.000,-	Rp. 1.740.000,-	97,15%
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
3.1.	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Rp. 7.124.800,-	Rp. 5.674.800,-	Rp. 1.450.000,-	79,65%
3.2.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp. 19.884.000,-	Rp. 19.884.000,-	Rp. 0,-	100%
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
4.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 6.995.550,-	Rp. 6.945.550,-	Rp. 50.000,-	99,29%
4.2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 39.539.200,-	Rp. 39.510.900,-	Rp. 28.300,-	99,93%
4.3.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp. 28.219.300,-	Rp. 28.159.300,-	Rp. 60.000,-	99,79%
4.4.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 2.400.000,-	Rp. 1.752.750,-	Rp. 647.250,-	73,03%
4.5.	Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp. 55.813.000,-	Rp. 55.713.000,-	Rp. 100.000,-	99,82%

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Sisa Tahun 2025 (Rp)	Penyerapan %
4.6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 273.380.000,-	Rp. 246.684.250,-	Rp. 26.695.750,-	90,23%
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
5.1.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 20.400.000,-	Rp. 8.584.000,-	Rp. 11.816.500,-	42,08%
5.2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 777.556.719,-	Rp. 737.727.455,-	Rp. 39.829.264,-	94,88%
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
6.1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 6.408.000,-	Rp.6.408.000,-	Rp. 0,-	100%
6.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 108.229.889,-	Rp. 88.692.986,-	Rp. 19.536.903,-	81,95%
6.3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 591.500.000,-	Rp. 585.960.000,-	Rp. 5.540.000,-	99,06%
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
7.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 391.288.000,-	Rp. 368.353.100,-	Rp. 22.934.900,-	94,14%
7.2.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 100.000.000,-	Rp. 99.800.000,-	Rp. 200.000,-	99,80%
B.	Program Penanggulangan Bencana				
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				
1.1.	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Rp. 152.643.000,-	Rp. 145.101.960,-	Rp. 7.541.040,-	95,06%
1.2.	Penyusunan Kajian Risiko Bencana kabuapten/ kota	Rp. 372.515.000,-	Rp. 352.749.675,-	Rp. 19.765.325,-	94,69%
2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				
2.1.	Pengelolaan Risiko Bencana Kab/kota	Rp. 31.110.000,-	Rp. 30.803.000,-	Rp.307.000,-	99,01%
2.2.	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Rp. 17.100.000,-	Rp.,-	Rp. 17.100.000,-	0%
2.3.	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Rp. 35.970.000,-	Rp. -	Rp. 35.970.000,-	0%
2.4.	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana kab/kota	Rp. 313.149.800,-	Rp. 298.995.400,-	Rp. 14.154.400,-	95,48%
2.5.	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Rp. 150.787.500,-	Rp. 134.347.500,-	Rp. 16.440.000,-	89,10%
3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban				

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Sisa Tahun 2025 (Rp)	Penyerapan %
	Bencana				
3.1.	Respon Cepat Darurat Bencana Kab/kota	Rp. 183.726.000,-	Rp. 180.410.000,-	Rp. 3.316.000,-	98,20%
3.2.	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Rp. 276.858.700,-	Rp. 144.287.004,-	Rp. 132.571.696,-	52,12%
4.	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				
4.1.	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Rp. 54.388.100,-	Rp. 50.891.700,-	Rp. 3.496.400,-	93,57%
4.2.	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/ Kota	Rp. 126.280.000,-	Rp. 120.853.500,-	Rp. 5.426.500,-	95,70%
C.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				
1.	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kab/kota				
1.1.	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kab/kota	Rp. 201.578.700,-	Rp. 179.875.325,-	Rp. 21.703.375,-	89,23%
	JUMLAH	Rp. 8.367.584.765,-	Rp. 6.281.640.769,-	Rp. 2.085.943.996,-	75,07%

Capaian Realisasi Anggaran Belanja Pada BPBD Kabupaten Barito Selatan selama periode tahun 2025 secara keseluruhan dan di bagi menjadi dua program dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.7. Tabel serapan anggaran

Program	Target		Realisasi		%
	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100%	Rp. 6.451.477.965,-	100%	Rp. 4.643.325.705,-	71,97%

Program Penanggulangan Bencana	100%	Rp. 1.714.528.100,-	100%	Rp. 1.458.439.739,-	85,06%
Program Pencegahan, Pananggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100%	Rp. 201.578.700	100%	Rp. 179.875.325,-	89,23%

Berdasarkan data pada tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2025 anggaran belanja pada BPBD Kabupaten Barito Selatan melalui mekanisme Perhitungan Efektivitas Anggaran Belanja BPBD Kabupaten Barito Selatan di dapatkan hasil seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.8. Perhitungan Efektivitas Realisasi Anggaran Belanja

Program	Anggaran	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi	Kriteria
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 6.451.477.965,-	Rp. 4.643.325.705,-	71,97%	Efektif
Program Penanggulangan Bencana	Rp. 1.714.528.100,-	Rp. 1.458.439.739,-	85,06%	Efektif
Program Pencegahan, Pananggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp. 201.578.700	Rp. 179.875.325,-	89,23%	Efektif

Dengan demikian realisasi anggaran belanja pada BPBD Kabupaten Barito Selatan dapat dikatakan efektif.

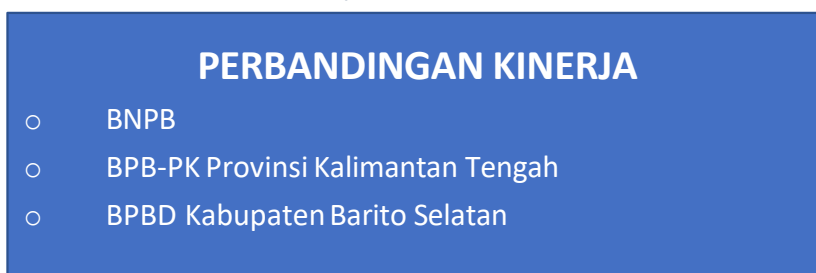
Sedangkan untuk Perhitungan Efisiensi Anggaran Belanja pada BPBD Kabupaten Barito Selatan dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini:

Tabel 3.9. Perhitungan Efisiensi Anggaran Belanja pada BPBD Kabupaten Barito Selatan

Program	Anggaran	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi	Kriteria
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 6.451.477.965,-	Rp. 4.643.325.705,-	71,97%	Efisien
Program Penanggulangan Bencana	Rp. 1.714.528.100,-	Rp. 1.458.439.739,-	85,06%	Efisien
Program Pencegahan, Pananggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp. 201.578.700	Rp. 179.875.325,-	89,23%	Efisien

Berdasarkan data yang ada pada tabel diatas maka dapat disimpulkan secara keseluruhan tingkat efisiensi Anggaran Belanja Pada BPBD Kabupaten Barito Selatan berada pada kriteria efisien.

Gambar 3.2. Grafik Indeks Risiko Bencana



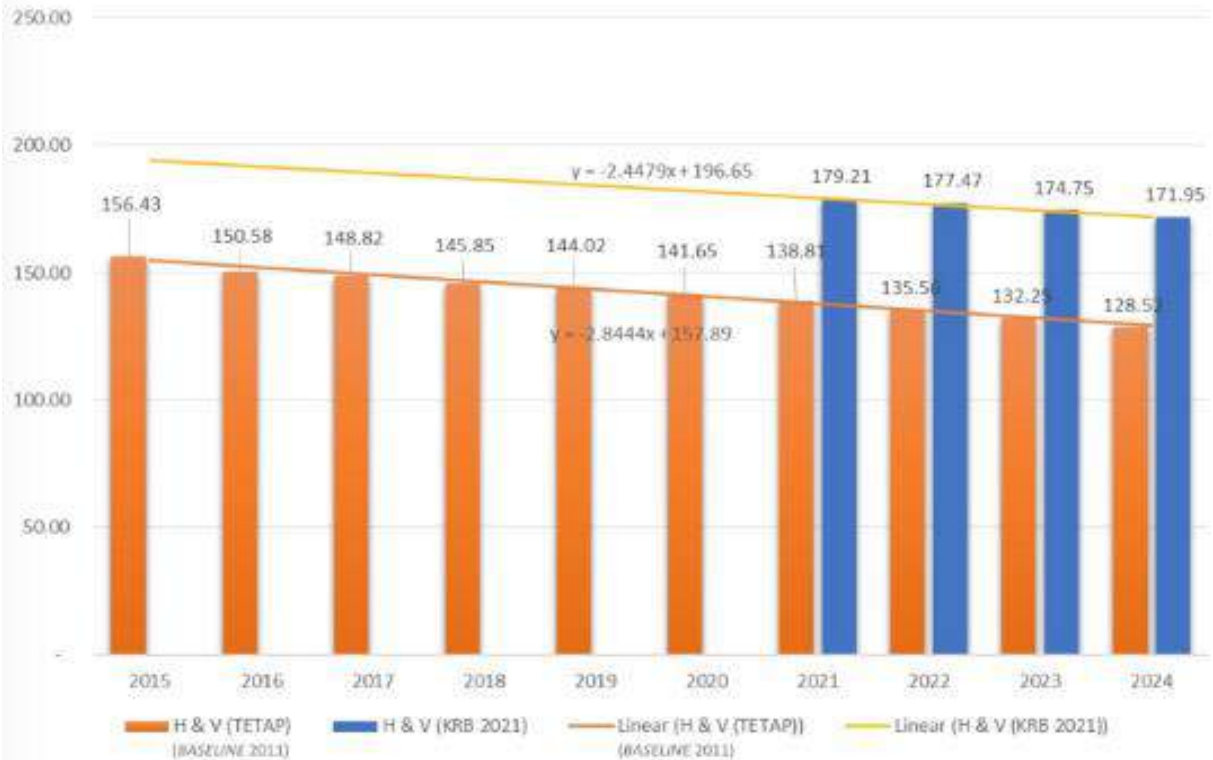


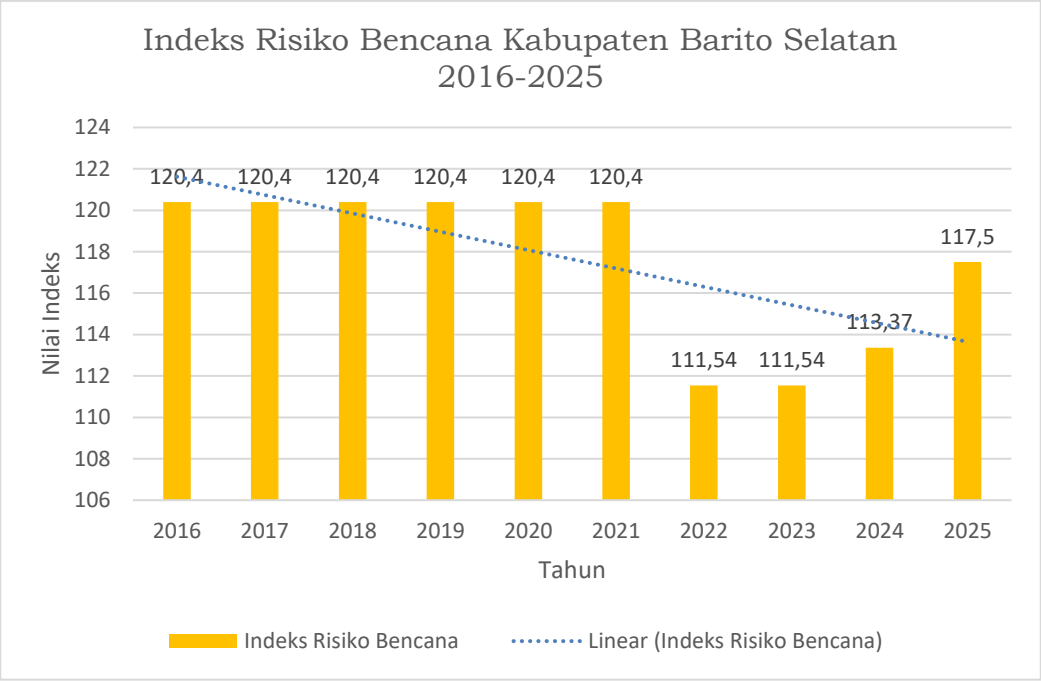
Tabel nilai indeks risiko Provinsi Kalimantan Tengah dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2024

NO	KABUPATEN/KOTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	KELAS RISIKO 2024
1	KATINGAN	163.20	163.20	163.20	163.20	163.20	163.20	163.20	157.71	157.71	140.74	SEDANG
2	KAPUAS	179.20	127.62	123.33	123.33	123.33	123.33	140.09	135.95	135.95	140.74	SEDANG
3	GUNUNG MAS	139.20	139.20	139.20	139.20	139.20	139.20	139.20	139.20	134.41	134.47	SEDANG
4	PULANG PISAU	168.40	168.40	168.40	168.40	168.40	168.40	146.47	127.12	127.12	132.95	SEDANG
5	KOTAWARINGIN TIMUR	156.40	156.40	156.40	156.40	156.40	156.40	156.40	140.65	140.65	124.85	SEDANG
6	SUKAMARA	144.40	144.40	144.40	144.40	144.40	144.40	144.40	140.33	130.94	122.61	SEDANG
7	SERUYAN	144.40	144.40	144.40	144.40	144.40	144.40	144.40	136.28	136.28	118.35	SEDANG
8	MURUNG RAYA	120.40	120.40	120.40	120.40	120.40	120.40	120.40	120.40	120.40	116.89	SEDANG
9	BARITO SELATAN	120.40	120.40	120.40	120.40	120.40	120.40	120.40	111.54	111.54	113.37	SEDANG
10	BARITO TIMUR	120.40	120.40	120.40	120.40	120.40	120.40	116.65	106.50	106.50	107.61	SEDANG
11	KOTA PALANGKARAYA	148.40	119.62	112.05	103.50	99.29	99.29	94.57	92.40	96.74	104.85	SEDANG
12	BARITO UTARA	120.40	120.40	120.40	120.40	120.40	120.40	117.57	112.25	112.25	100.95	SEDANG
13	KOTAWARINGIN BARAT	144.40	144.40	144.40	144.40	144.40	144.40	133.58	121.33	109.70	100.45	SEDANG
14	LAMANDAU	93.20	93.20	93.20	93.20	93.20	93.20	93.20	83.87	83.87	85.95	SEDANG

*Catatan : nilai indeks risiko yang tidak mengalami perubahan disebabkan kecenderungan nilai kapasitas yang konstan

INDEKS RISIKO BENCANA RATA-RATA NASIONAL 2015 - 2024





BAB IV. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dibangun dalam rangka upaya mewujudkan *good governance* dan sekaligus *result oriented government*. SAKIP merupakan sebuah system dengan pendekatan manajemen berbasis kinerja (*Performance-base Management*) untuk penyediaan informasi kinerja guna pengelolaan kinerja. Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintahan yang baik, maka perlu disusun laporan akuntabilitas pada setiap akhir tahun.

LKIP BPBD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi selama tahun anggaran 2025. Laporan tersebut merupakan implementasi dari Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pencapaian kinerja BPBD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai keberhasilan sasaran di tahun 2025 yang diukur dengan menggunakan indikator kinerja berdasarkan perbandingan antara realisasi dengan pagu anggaran, menunjukkan capaian rata-rata indikator kinerja sasaran **baik**.

Dari hasil pengukuran kinerja nampak bahwa secara umum BPBD telah berhasil mencapai target kinerja sasaran dan kegiatan serta telah dapat memenuhi fungsi yang dibebankan pada organisasi dari 3 (tiga) sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Meskipun secara rata-rata capaian sasaran dan kegiatan sangat baik, namun belum seluruh target kinerja sasaran maupun kegiatan dapat dicapai seperti yang diharapkan. Hal ini tidak terlepas dari faktor-faktor lingkungan baik internal misalnya sosialisasi, mengukur, mencatat dan melaporkan kinerja yang terjamin integritas data dan ketepatan waktunya mesti terus ditingkatkan, maupun lingkungan eksternal misalnya kerjasama, sinergi dan kualitas komunikasi dengan aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta lembaga atau pihak- pihak lainnya yang harus terus ditingkatkan, dengan demikian kinerja organisasi terutama capaian sasaran diharapkan dapat dicapai sesuai rencana yang ditetapkan.

4.2. Saran

Sangat disadari masih diperlukan perbaikan di berbagai bidang agar dapat mempertahankan bahkan untuk meningkatkan kinerja yang telah dicapai organisasi. Adapun hal-hal yang perlu mendapat perhatian untuk tahun-tahun yang akan datang guna mencapai kinerja yang lebih baik dari setiap jajaran di lingkungan BPBD, maka diperlukan:

1. Penyempurnaan implementasi anggaran berbasis kinerja agar seluruh kegiatan dapat dinilai kinerjanya secara tepat.
2. Indikator kinerja kegiatan dan indikator program perlu disempurnakan secara terus menerus melalui upaya identifikasi, pengembangan, seleksi dan konsultasi secara terus menerus sehingga dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian program/kegiatan di masing-masing unit kerja pelaksana kegiatan di lingkungan Sekretariat Daerah.
3. Peningkatan pengkoordinasian di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan khususnya BPBD Kabupaten Barito Selatan itu sendiri, baik peningkatan pengkoordinasian APBD maupun penyusunan perumusan kebijakan dan program kerja dalam pelaksanaan operasional pemerintah daerah.

Buntok, 12 Februari 2026

Kepala Pelaksana,

Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Barito Selatan




AGUS IN' YULIUS, S.T., M.T.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19690806 200312 1 009